MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri;

8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;

9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Daftar Pemberkasan dan Pelaporan serta Penyerahan Arsip Terjaga;

12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip Kemenlu yang selanjutnya disebut Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI di Luar Negeri.
2. Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip yang selanjutnya disingkat KKAA adalah klasifikasi yang dibuat untuk keamanan akses arsip sesuai dengan tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan dan pengaturan ketersediaan arsip bagi yang berhak serta perlindungan terhadap fisik dan informasi arsip.

3. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses arsip Kemenlu.
4. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
5. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
6. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemerintahan.
8. Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan apapun.

Pasal 2

(1) KKKA dimaksudkan untuk mengatur tingkat akses arsip bagi para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kemenlu.
(2) KKKA ditujukan untuk menjaga keamanan fisik dan muatan informasi yang terdapat pada arsip Kemenlu agar dapat terjaga dengan baik.

Pasal 3

KKAA Kementerian Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 AGUSTUS 2015
MENTERI LUAR NEGERI,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1284

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
AKSES ARSIP

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	**DL**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	DL.01	**Perencanaan dan Evaluasi**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program, koordinasi penyusunan kurikulum, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, bio data peserta dan widyaiswara, penilaian peserta dan widyaiswara, serta sertifikat				
	DL.01.01	Perencanaan	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
		a. Diklat Diplomatik				
		b. Diklat Non Diplomatik				
		c. Diklat Teknis				
		d. Diklat Struktural				
		e. Diklat Kerjasama Lembaga Diklat				
	DL.01.02	Evaluasi	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
		a. Diklat Diplomatik				
		b. Diklat Non Diplomatik				
		c. Diklat Teknis				
		d. Diklat Struktural				
		e. Diklat Kerjasama Lembaga Diklat				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DL.02	**Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik**	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang				
	DL.02.01	Diklat Sekdilu				
	DL.02.02	Diklat Sesdilu				
	DL.02.03	Diklat Sesparlu				
	DL.03	**Pendidikan dan Pelatihan Non Diplomatik dan Teknis**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Nondiplomatik dan teknis				
	DL.03.01	Diklat Komunikasi	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
	DL.03.02	Diklat Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
	DL.03.03	Diklat Bahasa dan Teknis	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
	DL.04	**Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Kerja Sama Lembaga Pendidikan dan Pelatihan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan lembaga instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta, organisasi internasional dan lembaga-lembaga swasta lainnya dan tugas belajar serta penyiapan bahan pembinaan sekolah Indonesia di luar negeri				
	DL.04.01	Diklat Struktural	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
	DL.04.02	Kerja sama Diklat dan Tugas Belajar	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
	DL.04.03	Sekolah Indonesia di luar negeri	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat
	DL.04.04	Perjanjian Kerjasama Diklat Internasional	Biasa	Eselon IV		Pusdiklat

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
2	**KP**	**KEPEGAWAIAN**				
	KP.01	**Perencanaan, Pengembangan, dan Pembinaan Pegawai**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis dan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan dan pembinaan pegawai				
	KP.01.01	Jabatan Fungsional Diplomat dan analisis pengembangan kemampuan pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
	KP.01.02	Formasi dan Pengadaan Pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		a. Formasi Pengawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		b. Pengadaan Pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
	KP.01.03	Evaluasi Kinerja dan Perkembangan Karir Pegawai	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.01.04	Pembinaan dan kedisiplinan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.02	**Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penilaian pegawai, dan mutasi pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri				
	KP.02.01	Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri I	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
		- Sekretariat Jenderal				
		- Staf Ahli Menteri				
		- Direktorat Jenderal Aspasaf				
		- Direktorat Jenderal Hukum Perjanjian Internasional				
		- Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik				
	KP.02.02	Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri II	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
		- Direktorat Jenderal Amerop				
		- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan				
		- Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler				
		- Direktorat Jenderal Multilateral				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		- Perwakilan RI di kawasan Eropa				
	KP.02.03	Administrasi Kepegawaian Dalam Negeri III	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
		- Inspektorat Jenderal				
		- Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN				
		- Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik				
		- Perwakilan RI di kawasan Amerika, Eropa dan Timur Tengah				
	KP.02.04	Administrasi Penilaian Pegawai dan administrasi mutasi	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
		- Penilaian pegawai				
		- Mutasi pegawai di dalam negeri				
	KP.03	**Administrasi Kepegawaian Luar Negeri**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi mutasi pejabat dinas luar negeri/pegawai negeri sipil, gelar diplomatik, dan nondiplomatik				
	KP.03.01	Administrasi Kepegawaian Wilayah Asia Pasifik dan Afrika	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.03.02	Administrasi Kepegawaian Wilayah Amerika dan Eropa	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.03.03	Penetapan Kepala Kanselerai, Pejabat Perbantuan, dan Pembekalan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.03.04	Gelar Diplomatik dan Nondiplomatik	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.04	**Perjalanan Mutasi Luar Negeri dan Administrasi Pegawai Setempat di Perwakilan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan luar negeri beserta barang pindahannya dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI				
	KP.04.01	Perjalanan Mutasi Pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
	KP.04.02	Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai setempat wilayah Asia Pasifik dan Afrika	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
	KP.04.03	Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai setempat wilayah Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KP.04.04	Kontrak dan Permasalahan Hukum Pegawai Setempat	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.04.05	Data Pribadi dan Kinerja Pegawai Setempat	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.05	**Tata Usaha Kepegawaian**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan penyusunan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan, kesejahteraan dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro				
	KP.05.01	Data Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.05.02	Pengangkatan dan pengakhiran jabatan	Terbatas	Eselon III	Terkait penilaian masing-masing individu	Biro Kepegawaian
	KP.05.03	Kesejahteraan Pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
	KP.05.04	Tata Usaha	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		a. Pengumuman hari libur dan cuti bersama	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		b. Cuti	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		c. Pajak dan LHKPN	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		d. Satya Lencana	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		e. Kartu Pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian
		f. Penugasan Pegawai	Biasa	Eselon IV		Biro Kepegawaian

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
3	**KU**	**KEUANGAN**				
	KU.01	**Pelaksanaan Anggaran**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Otorisasi, pertanggungjawaban keuangan Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan perjalanan dinas jabatan pegawai Sekretariat Jenderal serta mutasi pegawai				
	KU.01.01	Penyiapan pelaksanaan anggaran	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
		- Penyiapan pencairan anggaran				Biro Keuangan
		- Pembukuan				Biro Keuangan
		- Pertanggungjawaban belanja Pegawai, Belanja barang dan belanja modal				Biro Keuangan
		- Pengajuan Beban Pusat Pendidikan anak dan Beban Pusat Persekot resmi				Biro Keuangan
		- PPH 21 Perwakilan				Biro Keuangan
		- Pengajuan SPM dan SP2D				Biro Keuangan
	KU.01.02	Penerimaan PNBP dan transfer anggaran	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
		a. SPP-UP dan SPM-UP				Biro Keuangan
		b. SP2D-UP				Biro Keuangan
		c. Transfer				Biro Keuangan
		- Transfer UP Kementerian Luar Negeri				
		- Transfer UP Atase Teknis				
		- Transfer BBPA dan BPPR				
		d. Pembukuan dan Laporan PNBP				Biro Keuangan
	KU.01.03	Administrasi dan Pembiayaan perjalanan dinas	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
	KU.01.04	Gaji	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Biro Keuangan

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		a. Taspen				
		b. Payroll				
		c. SSBP TGR				
		d. SKPP				
	KU.02	**Pengendalian Anggaran**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengendalian anggaran dan menguji Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GUP) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) PNBP, PPh 21 dan memproses Surat Perintah Pencairan Dana Sekretariat Jenderal dan Perwakilan RI				
	KU.02.01	Pengendalian Anggaran Wilayah Eropa dan Afrika	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
	KU.02.02	Pengendalian Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
	KU.02.03	Pengendalian Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
	KU.03	**Verifikasi Anggaran**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan verifikasi pelaksanaan anggaran serta Nota Hasil Verifikasi dan Jawaban Nota Hasil Verifikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta membantu penyelesaian utang piutang Perwakilan RI				
	KU.03.01	Verifikasi Wilayah Eropa dan Afrika	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
	KU.03.02	Verifikasi Wilayah Asia dan Pasifik	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
	KU.03.03	Verifikasi Wilayah Amerika dan Timur Tengah	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
	KU.03.04	Verifikasi Wilayah Kementerian dan Pengolahan Data	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
		- Verifikasi Pelaksanaan Anggaran				
		- Pengolahan Data				
		- Pelaksanaan Sistem Pertanggungjawaban anggaran/sistem informasi manajemen keuangan (SIMKEU)				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KU.04	**Perhitungan Anggaran**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan data pelaksanaan anggaran, pembukuan, LRA, Neraca dan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI				
	KU.04.01	Perhitungan Anggaran Wilayah Eropa dan Afika	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
	KU.04.02	Perhitungan Anggaran Wilayah Asia dan Pasifik	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
	KU.04.03	Perhitungan Anggaran Wilayah Amerika dan Timur Tengah	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
	KU.04.04	Perhitungan Anggaran Kementerian dan Pengolahan Data	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Lembaga	Biro Keuangan
		- Mengumpulkan, menelaah dan membukukan realisasi anggaran				
		- Menganalisa, menyusun, dan membuat laporan keuangan perhitungan anggaran				
	KU.05	**Perbendaharaan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dan Tata Usaha Biro				
	KU.05.01	Pembinaan dan Ketatausahaan Keuangan	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
		a. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Ketatausahaan Keuangan				
		b. Penyusunan Petunjuk Teknis perizinan penggunaan dan monitoring Kas Besi				
		c. Penyusunan Petunjuk Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Satker Kementerian Luar Negeri				
		d. Penyusunan Petunjuk Teknis perizinan Pembukuan Fihak Ketiga (PFK)				
	KU.05.02	Pembinaan Perbendaharaan dan Penilaian Perbendaharaan	Biasa	Eselon IV		Biro Keuangan
		a. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Ketatausahaan Keuangan	Biasa	Eselon IV		

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Data informasi BPKRT	Biasa	Eselon IV		
		c. Data tindak lanjut TP/TGR	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	
		d. Data SK Pengelola Keuangan Pusat dan Perwakilan	Biasa	Eselon IV		
		e. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Serah Terima Jabatan Pusat dan Perwakilan	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia kondisi keuangan Perwakilan (Lembaga)	

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
4	**LA**	**LAYANAN ADMINISTRASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN**				
	LA.01	**Administrasi Kegiatan Kementerian**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi bagi Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Pejabat Khusus				
	LA.01.01	Data dan Pelaporan	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.01.02	Layanan Pejabat Khusus	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.01.03	Tata Usaha Staf Ahli	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.01.04	Tata Usaha	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.02	**Administrasi Kegiatan Perwakilan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi bagi Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan				
	LA.02.01	Administrasi Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	BAKP
	LA.02.02	Evaluasi Kinerja Kepala Perwakilan	Terbatas	Eselon III	dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	BAKP
	LA.03	**Administrasi Kegiatan Antarlembaga**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hubungan kerja antarlembaga				
	LA.03.01	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.03.02	Bidang Ekonomi	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.03.03	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.04	**Naskah dan Peraturan Perundang-undangan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, organisasi, keuangan dan perlengkapan				
	LA.04.01	Kajian Peraturan Perundang-undangan	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.04.02	Pelayanan Informasi Perundang-undangan	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.04.03	Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan	Biasa	Eselon IV		BAKP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	LA.05	**Tata Usaha Kementerian**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang tata persuratan, arsip dan dokumentasi, berita kawat dan pos kantong diplomatik				
	LA.05.01	Tata Persuratan	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.05.02	Arsip dan Dokumentasi	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.05.03	Pos Kantong Diplomatik	Biasa	Eselon IV		BAKP
	LA.05.04	Berita Kawat	Biasa	Eselon IV		BAKP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
5	**LM**	**LAYANAN ADMINISTRASI MENTERI**				
	LM.01	**Politik, Sosial dan Keamanan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyajian naskah politik, sosial, budaya, keamanan, dan hukum di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta Organisasi Internasional				
	LM.01.01	Asia Pasifik dan Afrika	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.01.02	Amerika dan Eropa	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.01.03	Organisasi Regional	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.01.04	Organisasi Multilateral	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.02	**Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyajian naskah ekonomi, keuangan dan pembangunan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika, Amerika dan Eropa serta Organisasi Internasional				
	LM.02.01	Asia Pasifik dan Afrika	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.02.02	Amerika dan Eropa	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.02.03	Organisasi Regional	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM
	LM.02.04	Organisasi Multilateral	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BAM

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	LM.03	**Informasi dan Media Massa**				
		Kompilasi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan pemberian informasi kepada media massa				
	LM.03.01	Penerjemah dan Penerjemahan	Biasa	Eselon IV		BAM
	LM.03.02	Media Cetak	Biasa	Eselon IV		BAM
	LM.03.03	Media Elektronik	Biasa	Eselon IV		BAM
	LM.04	**Umum**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri serta urusan pelayanan administrasi Biro				
	LM.04.01	Protokol Menteri	Biasa	Eselon IV		BAM

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
6	**PL**	**PERLENGKAPAN**				
	PL.01	**Analisis Kebutuhan dan Pengadaan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi barang-barang milik Kementerian Luar Negeri serta analisis dan rencana pengadaan gedung Perwakilan RI				
	PL.01.01	Analisis Kebutuhan Kementerian	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.01.02	Pengadaan Kementerian	Biasa	Eselon IV/Ka ULP		Biro Perlengkapan
	PL.01.03	Penyimpanan dan Distribusi Kementerian	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.01.04	Analisis dan Rencana Pengadaan Gedung Perwakilan	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.02	**Pemeliharaan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan gedung dan rumah dinas, peralatan, kendaraan dinas dan pengangkutan Kementerian Luar Negeri				
	PL.02.01	Gedung dan Rumah Dinas	Biasa	Eselon IV/Ka ULP		Biro Perlengkapan
	PL.02.02	Peralatan	Biasa	Eselon IV/Ka ULP		Biro Perlengkapan
	PL.02.03	Kendaraan Dinas dan Pengangkutan	Biasa	Eselon IV/Ka ULP		Biro Perlengkapan
	PL.03	**Inventarisasi**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI				
	PL.03.01	Inventarisasi Wilayah Asia dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.03.02	Inventarisasi Wilayah Afrika dan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.03.03	Inventarisasi Wilayah Eropa	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.03.04	Inventarisasi Wilayah Amerika dan Pusat/Kementerian	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PL.04	**Rumah Tangga**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang urusan dalam, Keamanan dan Ketertiban Kementerian Luar Negeri				
	PL.04.01	Urusan Dalam	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan
	PL.04.02	Keamanan dan ketertiban lingkungan	Biasa	Eselon IV		Biro Perlengkapan

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
7	**PW**	**PENGAWASAN**				
	PW.01	**Kebijakan Pengawasan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri diantaranya Perumusan Norma, Standar dan Prosedur, Perencanaan Pengawasan, Surat Keputusan Penugasan dan Data Pra Audit				
	PW.01.01	Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Asia Timur				
		b. Perwakilan RI Wilayah Asia Selatan dan Tengah				
		c. Direktorat Jenderal ASPASAF				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama ASEAN				
		e. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan				
	PW.01.02	Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Eropa Barat				
		b. Perwakilan RI Wilayah Erpa Tengah dan Timur				
		c. Direktorat Jenderal AMEROP				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama Multilateral				
		e. Direktorat Jenderal HPI				
	PW.01.03	Wilayah III	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Afrika				
		b. Perwakilan RI Wilayah Timur Tengah				
		c. Sekretariat Jenderal				
		d. Inspektorat Jenderal				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.01.04	Wilayah IV (Amerika dan Australia)	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Pasifik				
		b. Perwakilan RI Wilayah Amerika Utara dan Tengah				
		c. Perwakilan RI Wilayah Amerika Selatan dan Karibia				
		d. Direktorat Jenderal IDP				
		e. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler				
		f. Pusdiklat				
		g. Puskom				
	PW.02	**Pelaksanaan pengawasan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya				
	PW.02.01	Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Asia Timur				
		b. Perwakilan RI Wilayah Asia Selatan dan Tengah				
		c. Direktorat Jenderal ASPASAF				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama ASEAN				
		e. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan				
	PW.02.02	Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Eropa Barat				
		b. Perwakilan RI Wilayah Erpa Tengah dan Timur				
		c. Direktorat Jenderal AMEROP				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral				
		e. Direktorat Jenderal HPI				
	PW.02.03	Wilayah III	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Afrika				
		b. Perwakilan RI Wilayah Timur Tengah				
		c. Sekretariat Jenderal				
		d. Inspektorat Jenderal				
	PW.02.04	Wilayah IV (Amerika dan Australia)	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Pasifik				
		b. Perwakilan RI Wilayah Amerika Utara dan Tengah				
		c. Perwakilan RI Wilayah Amerika Selatan dan Karibia				
		d. Direktorat Jenderal IDP				
		e. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler				
		f. Pusdiklat				
		g. Puskom				
	PW.03	**Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu**	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri				
	PW.03.01	Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Asia Timur				
		b. Perwakilan RI Wilayah Asia Selatan dan Tengah				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Direktorat Jenderal ASPASAF				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama ASEAN				
		e. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan				
	PW.03.02	Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Eropa Barat				
		b. Perwakilan RI Wilayah Erpa Tengah dan Timur				
		c. Direktorat Jenderal AMEROP				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama Multilateral				
		e. Direktorat Jenderal HPI				
	PW.03.03	Wilayah III	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Afrika				
		b. Perwakilan RI Wilayah Timur Tengah				
		c. Sekretariat Jenderal				
		d. Inspektorat Jenderal				
	PW.03.04	Wilayah IV (Amerika dan Australia)	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Pasifik				
		b. Perwakilan RI Wilayah Amerika Utara dan Tengah				
		c. Perwakilan RI Wilayah Amerika Selatan dan Karibia				
		d. Direktorat Jenderal IDP				
		e. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler				
		f. Pusdiklat				
		g. Puskom				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.04	**Laporan Hasil Pengawasan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pengawasan baik internal maupun pengawasan fungsional yang meliputi Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (PHP), Laporan Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (LPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LH) dan Laporan Khusus				
	PW.04.01	Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Asia Timur				
		b. Perwakilan RI Wilayah Asia Selatan dan Tengah				
		c. Direktorat Jenderal ASPASAF				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama ASEAN				
		e. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan				
	PW.04.02	Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Eropa Barat				
		b. Perwakilan RI Wilayah Eropa Tengah dan Timur				
		c. Direktorat Jenderal AMEROP				
		d. Direkotrat Jenderal Kerja Sama Multilateral				
		e. Direktorat Jenderal HPI				
	PW.04.03	Wilayah III	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Afrika				
		b. Perwakilan RI Wilayah Timur Tengah				
		c. Sekretariat Jenderal				
		d. Inspektorat Jenderal				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PW.04.04	Wilayah IV (Amerika dan Australia)	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	ITJEN
		a. Perwakilan RI Wilayah Pasifik				
		b. Perwakilan RI Wilayah Amerika Utara dan Tengah				
		c. Perwakilan RI Wilayah Amerika Selatan dan Karibia				
		d. Direktorat Jenderal IDP				
		e. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler				
		f. Pusdiklat				
		g. Puskom				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
8	**RO**	**PERENCANAAN DAN ORGANISASI**				
	RO.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana dan Program kementerian**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja Kementerian Luar Negeri				
	RO.01.01	Penyusunan Rencana dan Program I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Perumusan Kebijakan dan Pedoman Kementerian Luar Negeri				
	RO.01.02	Penyusunan Rencana dan Program II	Biasa	Eselon IV		BPO
		a. Dirjen ASPASAF				
		b. Dirjen AMEROP				
		c. Dirjen Kerja Sama ASEAN				
		d. Dirjen Kerja Sama Multilateral				
		e. Dirjen IDP				
		f. Dirjen HPI				
		g. Dirjen Protkons				
		h. Inspektorat Jenderal				
	RO.01.03	Penyusunan Rencana dan Program III	Biasa	Eselon IV		BPO
		a. Sekretariat Jenderal				
		b. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan				
		c. Pusat Pendidikan dan Latihan				
		d. Pusat Komunikasi				
	RO.01.04	Evaluasi Rencana dan Program Kementerian	Biasa	Eselon IV		BPO

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.02	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi kinerja Perwakilan RI				
	RO.02.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Wilayah Amerika dan Pasifik				
	RO.02.02	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Wilayah Eropa				
	RO.02.03	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah III	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Wilayah Asia				
	RO.02.04	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perwakilan Wilayah IV	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Wilayah Afrika dan Timur Tengah				
	RO.03	**Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Perwakilan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI				
	RO.03.01	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Kementerian dan Standar biaya	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		a. Penyusunan Anggaran Kementerian dan Perwakilan RI				
		b. Standar biaya Kementerian dan Perwakilan				
	RO.03.02	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Perwakilan RI Wilayah AMEROP				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.03.03	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Perwakilan RI Wilayah Asia dan Pasifik				
	RO.03.04	Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Perwakilan Wilayah III	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah				
	RO.04	**Kelembagaan Kementerian dan Perwakilan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI				
	RO.04.01	Organisasi Kementerian	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
	RO.04.02	Organisasi Perwakilan Wilayah I	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Perwakilan RI di Wilayah Asia Pasifik dan Afrika				
	RO.04.03	Organisasi Perwakilan Wilayah II	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Perwakilan RI di Wilayah Amerika dan Eropa				
	RO.04.04	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kementerian dan Perwakilan	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Pelayanan Publik di Kementerian				
		- Pelayanan Publik di Perwakilan				
	RO.05	**Pengembangan dan Evaluasi Sistem Kerja Kementerian dan Perwakilan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan evaluasi sistem kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta Tata Usaha Biro				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	RO.05.01	Pengembangan Sistem Kerja Kementerian	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Prosedur dan tata kerja Kementerian Luar Negeri				
	RO.05.02	Pengembangan Sistem Kerja Perwakilan	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO
		- Prosedur dan tata kerja Perwakilan RI				
	RO.05.03	Evaluasi sistem kerja Kementerian dan Perwakilan	Terbatas	Eselon III	dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	BPO

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
9	**JB**	**PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN**				
	JB.01	**Penyusunan Kebijakan Teknis**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang politik dan hubungan luar negeri				
	JB.01.01	Kebijakan Teknis Kawasan Asia Pasifik	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.02	Kebijakan Teknis Kawasan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.03	Kebijakan Teknis Kawasan Afrika	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.04	Kebijakan Teknis Kawasan Amerika	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.05	Kebijakan Teknis Eropa Utara, Eropa Timur dan Balkan	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.06	Kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.07	Kebijakan Teknis Organisasi Internasional Global	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.08	Kebijakan Teknis Organisasi Internasional Regional	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.01.09	Isu-isu khusus/Tematik	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02	**Pelaksanaan Pengkajian**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri				
	JB.02.01	Kawasan Asia Pasifik	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.02	Kawasan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.03	Kawasan Afrika	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.04	Kawasan Amerika	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.05	Kawasan Eropa Utara, Eropa Timur dan Balkan	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.06	Kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.07	Organisasi Internasional Global	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.08	Organisasi Internasional Regional	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.09	Isu-isu khusus/Tematik	Biasa	Eselon IV		BPPK

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	JB.03	**Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri				
	JB.03.01	Kawasan Asia Pasifik	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.02	Kawasan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.03	Kawasan Afrika	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.04	Kawasan Amerika	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.05	Kawasan Eropa Utara, Eropa Timur dan Balkan	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.06	Kawasan Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.07	Organisasi Internasional Global	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.03.08	Organisasi Internasional Regional	Biasa	Eselon IV		BPPK
	JB.02.09	Isu-isu khusus/Tematik	Biasa	Eselon IV		BPPK

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
10	**BK**	**HUBUNGAN BILATERAL DAN INTRA KAWASAN**				
	BK.01	**Perumusan Kebijakan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan kebijakan hubungan bilateral dan intra kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya.				
	BK.01.01	Asia Timur dan Pasifik	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.02	Asia Selatan dan Tengah	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.03	Afrika	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.04	Timur Tengah	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.05	Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.06	Amerika Utara dan Tengah	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.07	Amerika Selatan dan Karibia	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.08	Eropa Barat	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.09	Eropa Tengah dan Timur	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.01.10	Intra Kawasan Amerika dan Eropa	Terbatas	Eselon III	Dapat Mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02	**Pelaksanaan Kebijakan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan hubungan bilateral dan intra kawasan di bidang politik, keamanan, ekonomi, keuangan, pembangunan, dan sosial budaya.				
	BK.02.01	Asia Timur dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BK.02.02	Asia Selatan dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.03	Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.04	Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.05	Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.06	Amerika Utara dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.07	Amerika Selatan dan Karibia	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.08	Eropa Barat	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.09	Eropa Tengah dan Timur	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.02.10	Intra Kawasan Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03	**Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan Norma, standar, prosedur dan Kriteria hubungan luar negeri				
	BK.03.01	Asia Timur dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.02	Asia Selatan dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.03	Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.04	Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.05	Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.06	Amerika Utara dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BK.03.07	Amerika Selatan dan Karibia	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.08	Eropa Barat	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.09	Eropa Tengah dan Timur	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.03.10	Intra Kawasan Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04	**Pemberian Bimbingan Teknis dan Evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian diseminasi informasi dan sosialisasi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam hubungan luar negeri				
	BK.04.01	Asia Timur dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.02	Asia Selatan dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.03	Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.04	Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.05	Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.06	Amerika Utara dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.07	Amerika Selatan dan Karibia	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.08	Eropa Barat	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.09	Eropa Tengah dan Timur	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.04.10	Intra Kawasan Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	BK.05	**Perundingan Bilateral dan Intra Kawasan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intra kawasan dengan negara-negara di kawasan ASPASAF dan AMEROP				
	BK.05.01	Asia Timur dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.02	Asia Selatan dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.03	Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.04	Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.05	Intra Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.06	Amerika Utara dan Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.07	Amerika Selatan dan Karibia	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.08	Eropa Barat	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.09	Eropa Tengah dan Timur	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP
	BK.05.10	Intra Kawasan Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen ASPASAF dan AMEROP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
11	**KA**	**KERJASAMA ASEAN**				
	KA.01	**Politik Keamanan ASEAN**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan Politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Politik, keamanan, Hukum dan Hak asasi manusia ASEAN serta Kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN				
	KA.01.01	Politik	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Kerja sama pembangunan Politik				
		b. Pembentukan, pengembangan dan kesinambungan Norma-norma ASEAN				
		c. Pencegahan Konflik				
	KA.01.02	Keamanan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Kerja sama pemberantasan kejahatan negara				
		b. Kerja sama keamanan Maritim				
		c. Kerja sama Pertahanan				
	KA.01.03	Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Hukum, Imigrasi dan Konsuler				
		b. Hak Asasi Manusia				
	KA.01.04	Kerja sama Forum, lembaga Regional dan Entitas ASEAN	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Kerja sama politik dan keamanan lembaga regional ASEAN				
		b. Kerja sama politik dan keamanan entitas ASEAN				
	KA.02	**Kerja Sama Ekonomi ASEAN**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama pilar ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi, dan sumber daya alam, investasi usaha mikro, kecil, menengah koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	KA.02.01	Perindustrian dan Perdagangan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Perindustrian				
		b. Perdagangan				
		c. *ASEAN Free Trade* dan Penyelesaian Sengketa				
	KA.02.02	Kerja sama Jasa Ekonomi	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Keuangan, Perbankan, Jasa Bisnis dan Konstruksi				
		b. Perhubungan dan Telekomunikasi				
		c. Pariwisata				
	KA.02.03	Komoditi dan Sumber Daya Alam	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan				
		b. Energi dan Mineral				
		c. Perikanan dan Kelautan				
	KA.02.04	Investasi dan Kerja sama Subkawasan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Investasi				
		b. Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi				
		c. Subkawasan				
	KA.03	**Kerja Sama Fungsional ASEAN**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama pilar sosial budaya ASEAN, yang antara lain meliputi kerja sama di bidang Sumber Daya Manusia, Yayasan ASEAN, Penerangan, Kebudayaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana dan Pembangunan Sosial				
	KA.03.01	Kerja sama Sumber Daya Manusia dan Yayasan ASEAN	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Kerja sama Pemuda, Perempuan dan Anak				
		b. Kerja sama Penanggulangan masalah narkotika dan obat-obat terlarang				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Kerja sama Pegawai Negeri ASEAN dan Yayasan ASEAN				
	KA.03.02	Penerangan, Kebudayaan dan Pendidikan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Kerja sama Penerangan				
		b. Kerja sama Kebudayaan				
		c. Kerja sama Pendidikan				
	KA.03.03	Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Biasa	Eselon IV		Dirjen KSA
		a. Kerja sama Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
		b. Kerja sama Lingkungan Hidup				
		c. Kerja sama Penanggulangan Bencana				
	KA.03.04	Pembangunan Sosial	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
		a. Kerja sama Sosial pembangunan pedesaan, pengentasan kemiskinan				
		b.Kerja sama Kependudukan dan Kesehatan				
		c. Kerja sama pelayanan masyarakat dan tenaga kerja				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
12	**MA.**	**MITRAWICARA DAN ANTAR KAWASAN**				
	MA.01	**Asia Timur**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
	MA.01.01	Kerja sama ASEAN-Cina	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.01.02	Kerja sama ASEAN-Jepang	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.01.03	Kerja sama ASEAN-Korea Selatan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.02	**Asia Selatan dan Pasifik**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Pasifik di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
	MA.02.01	Kerja sama ASEAN-India dan ASEAN-Pakistan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.02.02	Kerja sama ASEAN-Australia	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.02.03	Kerja sama ASEAN-Selandia Baru	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.03	**Amerika dan Eropa**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama mitra wicara dan antarkawasan ASEAN dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi				
	MA.03.01	Kerja sama ASEAN-Amerika Serikat dan ASEAN-Canada	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.03.02	Kerja sama ASEAN-Uni Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.03.03	Kerja sama ASEAN-Rusia	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	MA.04	**Kerja sama Organisasi Regional dan Organisasi Internasional**				
	MA.04.01	Kerja sama ASEAN-*Plus Three* (APT)	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.04.02	Kerja sama *East Asia Summit* (EAS)	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA
	MA.04.03	Kerja sama Antarkawasan dan ASEAN-Organisasi Internasional	Biasa	Eselon IV		Ditjen KSA

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
13	**TI**	**PENANGANAN ISU INTERNASIONAL**				
	TI.01	**Kontribusi dan Pencalonan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang kontribusi, pencalonan keanggotaan, dan pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional				
	TI.01.01	Kontribusi	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu tugas dan fungsi Lembaga	Ditjen KS Multilateral
	TI.01.02	Pencalonan	Rahasia	Eselon II	Dapat menggangu keRahasian negara	Ditjen KS Multilateral
	TI.01.03	Jabatan Pada Organisasi Internasional	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
	TI.02	**Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan keamanan internasional, senjata pemusnah masal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme				
	TI.02.01	Keamanan Internasional	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Konflik antar - internal negara				
		b. Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB				
		c. Kelembagaan Keamanan Internasional				
	TI.02.02	Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Senjata Nuklir				
		b. Senjata Kimia				
		c. Senjata Biologi				
		d. Senjata Konvensional				
	TI.02.03	Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Perdagangan Manusia (Trafficking In person)				
		b. Penyelundupan Manusia (people smuggling)				
		c. Bali Process				
		d. Narkoba				
		e. UNCAC				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		f. Wild Life Crime				
		g. IACA				
		h. CCPCJ				
		i. UNODC				
	TI.02.04	Penanggulangan Terorisme	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dalam Kerangka PBB				
		b. Kerja Sama Penanggulangan Terorisme di luar Kerangka PBB				
		c. Kerja Sama Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas				
	TI.02.05	Sidang Majelis Umum PBB	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
	TI.03	**Hak Asasi Manusia dan Keamanan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan kelompok rentan serta kemanusiaan				
	TI.03.01	Hak-hak sipil dan politik	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Pemajuan hak-hak sipil dan politik				
		b. Perlindungan hak-hak sipil dan politik				
		c. Mekanisme hak-hak sipil dan politik				
	TI.03.02	Hak-hak ekonomi, Sosial dan budaya dan pembangunan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Pemajuan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan Pembangunan				
		b. Perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan Pembangunan				
		c. Mekanisme hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan Pembangunan				
	TI.03.03	Hak-hak kelompok rentan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Hak Perempuan				
		b. Hak Anak				
		c. Hak Pekerja Migran				
		d. Hak-hak kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TI.03.04	Kemanusiaan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Humaniter				
		b. Lembaga Bantuan Kemanusiaan				
		c. Penanganan Pengungsi dan *Internally Displaced Persons*				
		d. Dampak Kemanusiaan Konflik Internal				
	TI.04	**Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penanganan isu-isu, kebijakan dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup				
	TI.04.01	Ekonomi dan Keuangan internasional	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Organisasi Pembangunan Ekonomi PBB				
		b. Lembaga Keuangan Internasional				
		c. Pembangunan Ekonomi Badan-badan Regional PBB				
		d. Administrasi, Anggaran dan koordinasi				
	TI.04.02	Pembangunan berkelanjutan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Pembangunan Berkelanjutan Global				
		b. Pengurangan Kemiskinan				
		c. Pembiayaan Pembangunan				
		d. Kegiatan Operasional PBB				
	TI.04.03	Kerja Sama Pembangunan Sektoral	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Kerja sama Teknologi Informasi dan Komunikasi				
		b. Kerja Sama Infrastruktur dan Komunikasi				
		c. Energy dan Sumber daya Mineral				
		d. sumber daya kelautan dan kehutanan				
	TI.04.04	Lingkungan Hidup	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		a. Lingkungan Hidup dan pemukiman				
		b. Perubahan Iklim				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		c. Keanekargaman Hayati				
		d. Pendanaan Global Program Lingkungan Hidup				
	TI.05	**Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual**				
	TI.05.01	Perdagangan Barang, Pembangaunan Industri dan Investasi				
		a. Perdagangan barang nonpertanian	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		b. Kerja Sama pembagunan industri	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		c. Kawasan perdagangan bebas	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		d. Kerja sama investasi dan isu-isu baru *Word Trade Organization*	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
	TI.05.02	Perdagangan Jasa, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		a. Perdagangan Jasa dan *E-Commerce*				
		b. Kerja Sama Perdagangan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup				
		c. Aksesi *Word Trade Organization* dan Kajian Kebijakan Perdagangan				
		d. Fasilisasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kelembagaan dan Peningkatan kapasitas				
	TI.05.03	Pertanian dan Komoditi	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		a. Pertanian				
		b. Komoditi Pangan dan Perkebunan				
		c. Komoditi Kehutanan dan Pertambangan				
		d. Komoditi Kelautan dan Dana Bersama Komoditi				
	TI.05.04	Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual dan Penyelesaian Sengketa				
		a. Standardisasi Barang dan Jasa	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		b. Penyelesaian Sengketa dan Pengamanan Perdagangan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
		c. Penanganan Hambatan Teknis Perdagangan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		d. Hak Kekayaan Intelektual	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	TI.06	**Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang**				
	TI.06.01	Pembangunan Sosial, Badan-badan Khusus PBB dan Isu-isu Terkini	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		a. Pembangunan Sosial				
		b. Badan-badan Khusus PBB				
		c. Demokratisasi dan Tata Kepemerintahan				
		d. Isu-isu Sains dan Teknologi				
	TI.06.02	Sosial Budaya dan Lembaga Non Pemerintah				Ditjen KS Multilateral
		a. Kesehatan Global	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		b. Pendidikan, Kebudayaan dan Kepariwisataan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		c. Ketenagakerjaan Internasional	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		d. Lembaga antar negara dan Organisasi Internasioanal Non Pemerintah	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu stabilitas keamanan negara	Ditjen KS Multilateral
	TI.06.03	Organisasi Internasional Negara Berkembang I				
		a. Politik Organisasi Konferensi Islam	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu fungsi lembaga	Ditjen KS Multilateral
		b. Ekonomi, Sosial dan budaya Organisasi Konferensi Islam	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		c. Politik Gerakan Non-Blok	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu fungsi lembaga	Ditjen KS Multilateral
		d. Ekonomi, Sosial dan Budaya Gerakan Non-Blok	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
	TI.06.04	Organisasi Internasional Negara Berkembang II				Ditjen KS Multilateral
		a. Kelompok-77	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		b. Kelompok -15	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral
		c. Kelompok D-8	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu fungsi lembaga	Ditjen KS Multilateral
		d. Kerja Sama Selatan-Selatan	Biasa	Eselon IV		Ditjen KS Multilateral

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
14	**PK**	**PROTOKOL DAN KONSULER**				
	PK.01	**Protokol**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang protokol dalam hal pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, tanda jasa dan tanda keormatan				
	PK.01.01	Pelayanan Keprotokolan				
		a. Kunjungan Kehormatan	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		b. Perwakilan Asing	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		c. Kementerian dan Lembaga Negara	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		d. Pemerintah daerah dan Lembaga pemerintah Nonkementerian	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		e. Ucapan selamat dan simpati	Biasa	Eselon IV		
	PK.01.02	Upacara Diplomatik	Terbatas	Eselon III	Dapat mengganggu fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
		a. Acara				
		b. Upacara				
		c. Logistik				
		d. Jamuan				
	PK.01.03	Tamu Asing	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		a. Acara				
		b. Upacara				
		c. Logistik				
		d. Jamuan				
	PK.01.04	Kunjungan	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		a. Persiapan				
		b. Upacara				
		c. Logistik				
		d. Jamuan				
	PK.01.05	Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		a. Persiapan				
		b. Pengusulan				
		c. Perizinan				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	PK.02	**Konsuler**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan, legalisasi dan jasa konsuler warga negara asing				
	PK.02.01	Paspor	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
		a. Amerika dan Eropa				
		b. Asia Pasifik dan Afrika				
		c. Pendataan				
	PK.02.02	Visa dan Tenaga Ahli Asing	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
		a. Amerika dan Eropa				
		b. Asia Pasifik dan Afrika				
		c. Tenaga Ahli Asing dan Organisasi Internasional				
	PK.02.03	Perizinan tinggal, Keluar dan Masuk Kembali	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
		a. Amerika dan Eropa				
		b. Asia Pasifik dan Afrika				
		c. Organisasi Internasional				
	PK.02.04	Perizinan Penerbangan, perkapalan dan legalisasi	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
		a. Penerbangan				
		b. Perkapalan				
		c. Legalisasi				
	PK.02.05	Jasa Konsuler warga negara asing	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
		a. Amerika Eropa dan Organisasi Internasional				
		b. Asia Pasifik				
		c. Afrika dan Timur Tengah				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
15	**FD**	**FASILITAS DIPLOMATIK**				
	FD.01	**Fasilitas Kendaraan Bermotor dan Barang**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang fasilitas Diplomatik dalam pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana, pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi, serta perizinan, pembangunan dan pengawasan				
	FD.01.01	Kendaraan bermotor dan barang wilayah Asia Pasifik dan Afrika dan Organisasi Internasional PBB	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	FD.01.02	Kendaraan bermotor dan barang wilayah Amerika dan Eropa dan Oragnaisasi Internasional Non-PBB	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	FD.02	**Fasilitas Perpajakan dan Prasarana**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang fasilitas perpajakan dan prasarana, telepon, listrik, air, dan retribusi untuk keperluan Perwakilan negara asing dan organisasi internasional serta mengevaluasi fasilitas yang diberikan kepada Indonesia di negara akreditasi				
	FD.02.01	Fasilitas Perpajakan dan prasarana wilayah Asia Pasifik dan Afrika serta Organisasi Internasional PBB	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	FD.02.02	Fasilitas Perpajakan dan prasarana wilayah Amerika dan Eropa serta Organisasi Internasional Non-PBB	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	FD.03	**Pendaftaran, Fasilitas Kunjungan Daerah dan Akreditasi**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang pendaftaran, fasilitas kunjungan, status akreditasi kantor, konsul jenderal, konsul, atase pertahanan, konsul kehormatan, pejabat perwakilan negara asing dan Organisasi Internasioanal dan keluarganya, penerbitan kartu tanda pengenal *(ID Card)* untuk pejabat perwakilan negara asing dan organisasi internasional dan keluarganya, konsul jenderal, konsul, atase pertahanan dan konsul kehormatan				
	FD.03.01	Pendaftaran dan Kartu tanda pengenal *(ID Card)*	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	FD.03.02	Fasilitas Kunjungan Daera dan Akreditasi	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	FD.04	**Perizinan, Bangunan dan Pengawasan**				
	FD.04.01	Perizinan dan Bangunan	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons
	FD.04.02	Pengawasan, Pengaduan dan Analisis	Terbatas	Eselon III	Berkaitan dengan rahasia individu dan fungsi Lembaga	Ditjen Protkons

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
16	**WN**	**PERLINDUNGAN WNI & BADAN HUKUM INDONESIA**				
	WN.01	**Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri**	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri, bantuan Hukum di bidang Perdata dan Pidana kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri serta bantuan Hukum di bidang Ketatanegaraan pada WNI di luar negeri				
	WN.01.01	Perdata	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keamanan negara	
	WN.01.02	Pidana	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keamanan negara	
	WN.01.03	Tata Negara				
	WN.02	**Perlindungan WNI di Indonesia**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bidang perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia di bidang Perdata dan Pidana kepada WNI di Indonesia				
	WN.02.01	Perdata	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	WN.02.02	Pidana	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keamanan negara	Ditjen Protkons
	WN.03	**Pengawasan Kekonsuleran**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan pelaksanaan analisis dan evaluasi pengawasan kekonsuleran				
	WN.03.01	Penyiapan Pengawasan	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	WN.03.02	Pelaksanaan Pengawasan	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	WN.03.03	Analisis dan Evaluasi	Biasa	Eselon IV		Ditjen Protkons
	WN.04	**Bantuan Sosial dan Repatriasi WNI**				Ditjen Protkons
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan kemanusiaan, pemulangan WNI bermasalah dan WNI terlantar di luar negeri				
	WN.04.01	Bantuan Kemanusiaan	Biasa	Eselon IV		
	WN.04.02	Deportasi	Biasa	Eselon IV		
	WN.04.03	Repatriasi				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
17	**HI**	**HUKUM DAN Perjanjian Internasional**				
	HI.01	**Hukum**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan hukum. Sosialisasi dan publikasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI				
	HI.01.01	Pelayanan Hukum	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen HPI
		a. Pelayanan Hukum Publik				
		b. Pelayanan Hukum Privat				
		c. Pelayanan Hukum Administrasi				
	HI.01.02	Pengkajian Produk Hukum	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen HPI
		a. Pengkajian Hukum Publik				
		b. Pengkajian Hukum Privat				
		c. Pengkajian Hukum Administrasi				
	HI.01.03	Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen HPI
		a. Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Publik				
		b. Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Privat				
		c. Publikasi dan Sosialisasi Produk Hukum Administrasi				
	HI.02	**Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian politik dan keamanan, kewilayahan dan kelautan				
	HI.02.01	Perjanjian Politik dan Keamanan	Rahasia	Eselon II	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Ditjen HPI
		a. Hukum Politik dan Keamanan				
		b. Hukum Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia				
		c. Hukum Kejahatan dan transnasional dan Ekstradisi				
	HI.02.02	Perjanjian Kewilayahan	Rahasia	Eselon II	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Ditjen HPI
		a. Perbatasan Laut				
		b. Perbatasan Maritim				
		c. Hukum Udara				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		d. Kerja sama Perbatasan				
	HI.02.03	Perjanjian Kelautan	Rahasia	Eselon II	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Ditjen HPI
		a. Penegakan Kedaulatan di laut				
		b. Organisasi Kelautan Internasional				
		c. Kerja sama Pemanfaatan Sumber Daya Laut				
	HI.03	**Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta pengelolaan naskah Perjanjian Internasional				
	HI.03.01	Perjanjian Perdagangan, Jasa Ekonomi, Investasi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen HPI
		a. Perdagangan				
		b. Jasa Ekonomi				
		c. Investasi dan Keuangan				
		d. Lingkungan Hidup				
		e. Persetujuan selaku tuan rumah (host country agreement)				
		f. Lembaga Swadaya Masyarakat				
	HI.03.02	Perjanjian Kerja sama Teknik, Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen HPI
		a. Kerja sama Teknik Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				
		b. Kerja sama Sosial				
		c. Pendidikan dan Kebudayaan				
		d. Ketenagakerjaan				
		e. Persetujuan selaku tuan rumah (host country agreement)				
		f. Lembaga Swadaya Masyarakat				
	HI.03.03	Pengelolaan dan Penyimpanan naskah Perjanjian Internasional	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen HPI
		a. Pengelolaan naskah dan depositori Perjanjian Internasional				
		b. Pengelolaan naskah Hukum Internasional				
		c. Publikasi naskah Perjanjian Internasional				
		d. Penyimpanan naskah Perjanjian Internasional				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
18	**KM**	**PENGELOLAAN KOMUNIKASI**				
	KM.01	**Persandian dan Telekomunikasi**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan dan pelaksanaan sistem persandian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta pendistribusian, transmisi dan dokumentasi berita				
	KM.01.01	**Distribusi**	Biasa	Eselon IV		Puskom
		Lembar tanda terima distribusi berita				
	KM.01.02	**Dokumentasi Berita**				
		a. Arsip berita Rahasia keluar	Rahasia	Eselon II	Dapat merugikan kepentingan Politik Luar Negeri dan Hubungan Luar Negeri	Puskom
		b. Arsip berita Biasa keluar	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
		c. Tanda terima pengembalian berita	Biasa	Eselon IV		Puskom
	KM.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dan Komunikasi**	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan telepon di lingkungan Kementerian Luar Negeri				
	KM.02.01	**Jaringan dan aplikasi sistem informasi**				
		a. Skema jaringan komputer	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
		b. Setting parameter jaringan komputer	Rahasia	Eselon II	Dapat merugikan kepentingan Politik Luar Negeri dan Hubungan Luar Negeri	Puskom
		c. Source code aplikasi	Rahasia	Eselon II	Dapat merugikan kepentingan Politik Luar Negeri dan Hubungan Luar Negeri	Puskom
	KM.02.02	**Sistem jaringan telepon**				
		a. Skema jaringan telepon	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
		b. Daftar nomor telpon dan ekstensi	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
	KM.03	**Pengamanan dan Pemeliharaan**	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kebijakan teknis pengamanan, pengembangan teknologi sistem persandian Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta pemeliharaan sarana persandian dan telekomunikasi				
	KM.03.01	**Pengamanan**				
		a. Dokumentasi kegiatan operasional	Rahasia	Eselon II	Dapat merugikan kepentingan Politik Luar Negeri dan Hubungan Luar Negeri	Puskom
		b. Berita acara serah terima Pejabat Komunikasi	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
		c. Daftar Pengamatan Pribadi Sandiman (DP2S)	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
		d. Sistem sandi, prototype dan instruksinya	Sangat Rahasia	Eselon II	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Puskom
		e. Daftar password VPN dan aplikasi	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
		f. Daftar AKS Unitkom Perwakilan	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
	KM.03.02	**Pemeliharaan**				
		Berita acara serah terima peralatan sandi dan peralatan pendukungnya	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom
		Data inventarisasi peralatan sandi pusat dan perwakilan	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Puskom

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
19	**DM**	**INFORMASI DIPLOMASI PUBLIK**				
	DM.01	**Informasi dan Media**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri				
	DM.01.01	Berita	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Berita untuk Perwakilan				
		b. Berita untuk Instansi Pemerintah				
		c. Transkripsi dan Publikasi				
		d. Penyimpanan Data				
	DM.01.02	Multimedia	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Olah Info Multilateral				
		b. Olah Info Regional				
		c. Olah Info Bilateral dan Nasional				
		d. Pengelola Jaringan Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Dapat menggangu pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	
	DM.01.03	Data Media				
		a. Monitoring Berita Media Asing	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		b. Analisis Media Massa	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		c. Data Politik, Keamanan dan Sosial Budaya	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		d. Data Ekonomi, Perdagangan, Investasi dan Pariwisata	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
	DM.01.04	Fasilitas Media Massa				
		a. Akreditasi Media Asing	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		b. Liputan Media	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		c. Kerja Sama Antar Media	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		d. Media Massa Nasional	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
	DM.01.05	Audio Visual dan Penerbitan				
		a. Liputan dan Pengolahan Audiovisual	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		b. Penyimpanan dan Penggandaan hasil Audiovisual	Biasa	Eselon IV		Dirjen IDP
		c. Penerbitan	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DM.02	**Diplomasi Publik**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan diplomasi publik untuk mendpatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya serta isu-isu aktual dan strategis				
	DM.02.01	Politik dan Keamanan	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen IDP
		a. Politik				
		b. Keamanan				
		c. Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah				
	DM.02.02	Ekonomi dan Pembangunan'	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Ekonomi				
		b. Pembangunan				
		c. Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah				
	DM.02.03	Sosial dan Budaya	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Sosial				
		b. Budaya				
		c. Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah				
	DM.02.04	Isu-isu Aktual dan Strategis	Terbatas	Eselon III	Dapat terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan	Ditjen IDP
		a. Strategis Kewilayahan				
		b. Strategis Lokal				
		c. Hubungan Antarlembaga Pemerintah/Nonpemerintah				
	DM.02.05	Penyelenggaraan Museum KAA	Biasa	Eselon IV		
		a. Publikasi dan Promosi Nilai-nilai KAA				
		b. Pelestarian Dokumentasi KAA				

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DM.03	**Kerja Sama Teknik**				
		Naskah-naskah yang berkaitan dengan kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada Organisasi Intenasional				
	DM.03.01	Kerja sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Asia Tenggara				
		b. Asia Timur dan Pasifik				
		c. Asia Tengah dan Selatan				
	DM.03.02	Kerja sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Amerika				
		b. Uni Eropa				
		c. Non-Uni Eropa				
	DM.03.03	Kerja sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Afrika Barat dan Selatan				
		b. Afrika Tengah dan Timur				
		c. Timur Tengah				
	DM.03.04	Kerja sama Teknik Organisasi Internasional	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Organisasi PBB				
		b. Organisasi Non-PBB Global				
		c. Organisasi Non-PBB Regional				
	DM.03.05	*Public Private Partnership* (PPP)	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP

NO	KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
	DM.03.01	Kerja sama Teknik Wilayah Asia dan Pasifik	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Asia Tenggara				
		b. Asia Timur dan Pasifik				
		c. Asia Tengah dan Selatan				
	DM.03.02	Kerja sama Teknik Wilayah Amerika dan Eropa	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Amerika				
		b. Uni Eropa				
		c. Non-Uni Eropa				
	DM.03.03	Kerja sama Teknik Wilayah Afrika dan Timur Tengah	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Afrika Barat dan Selatan				
		b. Afrika Tengah dan Timur				
		c. Timur Tengah				
	DM.03.04	Kerja sama Teknik Organisasi Internasional	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP
		a. Organisasi PBB				
		b. Organisasi Non-PBB Global				
		c. Organisasi Non-PBB Regional				
	DM.03.05	PPP	Biasa	Eselon IV		Ditjen IDP

KODE KLAS	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
AD	**KEAMANAN DIPLOMATIK**				
AD.01	**Pengamanan Informasi**				
	Naskah-naskah yang berkaitan dengan keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi politik dan keamanan				
AD.01.01	Politik	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.01.02	Keamanan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.02	**Pengamanan Personalia**				
AD.02.01	Dalam Negeri	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.02.02	Luar Negeri	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.03	**Kerja sama Pengamanan Dalam Negeri**				
AD.03.01	Kerja sama Internal	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.03.02	Kerja sama Antarlembaga	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.04	**Kerja sama Pengamanan Luar Negeri**				
AD.04.01	Kerja sama Intelijen Luar Negeri	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP
AD.04.02	Kerja sama Pengamanan Perwakilan	Rahasia	Eselon II	Dapat mengganggu keutuhan NKRI	Ditjen IDP

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI